

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang telah diperjanjikan Sekretariat Kabinet kepada pimpinan dan *stakeholders* selama tahun 2015. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019 serta dokumen perencanaan turunannya.

Dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet telah menetapkan visinya yaitu “Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”. Guna mencapai visinya tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan misinya sebagai berikut “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Dalam mencapai visi dan misinya, Sekretariat Kabinet juga telah menetapkan tujuan strategis yaitu “Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”.

Guna menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, Sekretariat Kabinet pada dokumen PK awal tahun 2015 telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan selanjutnya karena ada reorganisasi maka disusunlah dokumen PK perubahan yang memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Karena reorganisasi terjadi pada pertengahan tahun 2015, maka laporan ini akan menggabungkan dan menceritakan kinerja 2 (dua) sasaran strategis pada PK awal dan 3 (tiga) pada PK Perubahan 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian
Sasaran 1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas					
1.	a. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	100%	98,37%	98,37%	Sangat Baik
	b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Memuaskan
	c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%	96,79%	96,79%	Sangat Baik
Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden					
2.	Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti	100%	97,41%	97,41%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet					
3.	a. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet	100%	92,17%	92,17%	Sangat Baik
	b. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet	100%	91,55%	91,55%	Sangat Baik
Sasaran 4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden					
4.	Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden	100%	84%	84%	Baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian
Sasaran 5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi Sekretariat Kabinet					
5.	a. Jumlah pengakses <i>website</i> Sekretariat Kabinet	1.900.000 pengakses	2.362.909 pengakses	124,36%	Memuaskan
	b. Jumlah pendownload layanan data/informasi Sekretariat Kabinet	800.000 <i>pendownload</i>	823.123 <i>pendownload</i>	102,89%	Memuaskan
	c. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%	90,10%	100,11%	Memuaskan

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 10 IKU yaitu 8 IKU berdasarkan PK Perubahan 2015 dan 2 IKU dari PK awal 2015 (hanya diukur selama periode 7 bulan sebelum reorganisasi/tugas dan fungsinya berpindah kepada K/L lain setelah reorganisasi), terdapat 4 (empat) IKU yang berstatus biru dengan kategori “memuaskan”, 5 (lima) IKU yang berstatus hijau dengan kategori “sangat baik” dan 1 (satu) IKU yang berstatus oranye dengan kategori “baik”. Lebih lanjut, secara keseluruhan, tingkat capaian Sekretariat Kabinet tahun 2015 sebesar 98,76% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian IKU atau rata-rata capaian sasaran. Berdasarkan capaian IKU-nya, dari 5 sasaran strategis (yaitu 3 sasaran pada dokumen PK perubahan 2015 dan 2 sasaran pada PK awal 2015), sebanyak 5 (lima) sasaran atau keseluruhan sasaran strategis dinyatakan “berhasil”. Sasaran dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 80\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas dan manajemen kinerja, telah dilakukan *self-review* terhadap pelaksanaan SAKIP Sekretariat Kabinet. *Self review* tersebut menghasilkan beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut menyangkut masalah kecukupan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), penyeragaman instrumen pengukuran kinerja, dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil *self-review* dimaksud Sekretariat Kabinet juga telah melakukan sejumlah upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP antara lain melakukan *coaching* dan pendampingan secara intensif terhadap unit kerja terkait pelaksanaan AKIP, merumuskan indikator tujuan dalam

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, mengoptimalkan pemanfaatan perencanaan kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap capaian kinerja, melakukan pengukuran kinerja individu bagi seluruh pegawai Sekretariat Kabinet melalui aplikasi SKP *online*, membangun dan mengembangkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA), meningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, dan lain-lain.

Selain dari beberapa upaya tersebut, terdapat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, antara lain optimalisasi peranan unit fasilitasi operasional di masing-masing Kedeputian dalam meningkatkan kualitas SAKIP di tingkat unit kerja, mensinergikan hasil evaluasi kinerja intern dengan hasil evaluasi kinerja eksternal dan optimalisasi monitoring tindak lanjut atas hasil evaluasi, pengembangan SIMONJA guna meningkatkan kualitas pengukuran dan pengumpulan data kinerja, serta pelaksanaan *benchmarking* terhadap *best practices* implementasi SAKIP di K/L yang telah mendapatkan penilaian terbaik dalam hal akuntabilitas kinerja.

Implementasi akuntabilitas kinerja secara berkualitas memerlukan dukungan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja (ABK). Gambaran umum tentang realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015, semula Sekretariat Kabinet menerima alokasi anggaran sebesar Rp183.078.182.000,00. Namun kemudian Sekretariat Kabinet diberikan tambahan anggaran sehingga menjadi Rp197.103.291.000,00. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp146.543.214.682,00 atau 74,35% dari total pagu. Realisasi anggaran ini mengalami penurunan sebesar 1,76% dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi sebesar Rp149.166.468.378,00. Meskipun demikian, penurunan ini lebih kecil dibandingkan tahun 2014 yang mengalami penurunan anggaran sebesar 7% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi anggaran tersebut sebenarnya merupakan efisiensi/penghematan mengingat rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2015 adalah 98,76% (target tercapai namun masih ada sisa anggaran). Efisiensi tersebut berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan, pembatasan atau pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan/

pengurangan penyelenggaraan rapat-rapat di hotel, penghematan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta dampak dari kebijakan monitoring dan evaluasi yang diterapkan secara konsisten dan kontinyu.

2. Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen awal Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2015 semula sebesar Rp23.185.022.000,00 yang diperjanjikan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis. Namun selanjutnya alokasi anggaran tersebut direvisi dalam dokumen PK Perubahan 2015 menjadi Rp28.073.764.000,00 yang digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran. Sebagai informasi untuk alokasi anggaran pada PK perubahan tersebut tidak termasuk alokasi anggaran untuk 2 (dua) sasaran strategis pada PK awal yang setelah reorganisasi dialihkan kepada Kementerian lain (Kementerian Sekretariat Negara).
3. Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp20.113.875.494,00 atau 67,66% dari total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2015 secara total, maka realisasi anggaran tersebut mencapai 13,72% dari total realisasi anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, maka ada penurunan sebesar 4,83%. Namun, jika dibandingkan dengan total realisasi anggaran, ada peningkatan realisasi sebesar 3,42% mengingat realisasi anggaran untuk kinerja tahun 2014 adalah 10,30% dari total realisasi anggaran.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai *baseline* data untuk perbaikan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan serta reuiu capaian kinerja bagi pimpinan utamanya untuk peningkatan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.